

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A'an Efendi dan Freddy Poernomo, (2017) *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abu Daud Busroh, (1994) *Capita Selecta Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Abdul Halim dan Evi Maria, (2020) *Problematisa Hukum Dalam pengelolaan keuangan Negara dan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Abdul Mukthie Fadjar, (2005) *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing.
- , (2016) *Sejarah Elemen dan Tipe, Negara Hukum*. Malang: Setara Press.
- , (2018) *Negara Hukum Dan Perkembangan Teori Hukum, Sejarah Dan Pergeseran Paradigma*. Malang: Intrans Publishing.
- Aminoto, (2015) *Ilmu Negara*. Tangerang Selatan.
- Azhary, (1995) *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*. Jakarta: UI-Press.
- Barda Nawawi Arief, (2002) *Bunga Rampai, Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , (2013) *Kapita Selecta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bintan R Saragih, (1994) *Clean Government Dalam Rangka Mewujudkan Negara Hukum*. Jakarta: Pidato Ilmiah UNTAG.
- Dahlan Thaib dan Jazim Hamidi dan Ni'Matul Huda (2019) *Teori dan Hukum Konstitusi*. Depok: Rajawali Press.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1999) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Didi Nazmi Yunas, (1992) *Konsepsi Negara Hukum*. Padang: Angkasa Raya.

- Effendi Jonaedi dan Jonny Ibrahim, (2018) *Metode Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Hiariej O.S. Eddy, (2015) *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- , (2016) *Hukum Pidana*. Tangerang: Universitas Terbuka.
- HS. Salim dan Erlies Septiana Nurbani. (2019) *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- H. Harris Soche, (1985) *Supermasi Hukum Dan prinsip Demokrasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Hanindita Offset.
- Jimly Asshiddiqie, (2007) *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- , (2009) *Menuju Negara Hukum Yang Demokrasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- , (2015) *Penghantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- , (2020) *Perihal Undang-Undang*. Depok: Rajawali Press.
- Joko Sasmito, (2018) *Penghantar Negara Hukum dan Ham*. Malang: Setara Press
- Jonaedi Effendi dan Jonny Ibrahim, (2018) *Metode Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group.
- Kusnardi. Moh dan Harmaily Ibrahim, (1988) *Penghantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti.
- Marpaung.Lintje Anna, (2018) *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: ANDI.
- Maskur Hidayat, (2015) *Konsep Negara Kemaslahatan, Telaah Terhadap Teori Negara Menurut Imam Al Mawardi, Thomas Hobbes, John Locke dan Jean Jacques Rousseau*. Surabaya: Laros.
- Nandang Alamsah Deliarnoor dan Tim Penyusun (2020), *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintah*, Bandung: Unpad Press.
- Nasution Bahder Johan, (2014) *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Ni'Matul Huda, (2018) *Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: Rajawali Press,

- Notohamidjojo, (1990) *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara Dan Wibawa Hukum Bagi Masyarakat Di Indonesia*. Djakarta: Badan Penerbit Kristen.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, (1993) *Sendi-Sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Wiyono, (2016) *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, (1997) *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Reza A.A. Wattimena, (2007) *Melampaui Negara Hukum Klasik, Locke-Rousseau-Habermas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ridwan HR, (2018) *Hukum Administrasi Negara*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Sarja, (2016) *Negara Hukum teori dan Praktek*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Sibuea. Hotma P, (2010) *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Erlangga.
- , (2014) *Ilmu Negara*. Jakarta: Erlangga.
- , dan Dwi Seno Wijanarko, (2020) *Dinamika Negara Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- , dan Asmak ul Hosnah, (2020) *Sendi-Sendi Hukum Konstitusional, Problematika Wewenang Organ Negara Dalam Penetapan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Depok: Rajawali Pers.
- Sihombing. Eka N.A.M (2019) *Penghantar Hukum Konstitusi*. Malang: Setara Press.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, (1990) *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali.
- Soerjono Soekanto, (2019) *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok, Rajawali Pers.
- Sudargo Gautama, (1955) *Pengertian Tentang Negara Hukum*. Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo, (1993) *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- , (2010) *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

-----, (2019) *Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.

Tatiek Sri Djatmiati, (2020) *Hukum Administrasi Sebuah Bunga Rampai*. Yogyakarta: LaksBang Justitia.

Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, (2020) *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*. Rawamangun: Sinar Grafika.

Titon Slamet kurnia, (2016) *Sistem Hukum Indonesia, Sebuah Pemahaman Awal*. Bandung: Mandar Maju.

Padmo Wahjono, (1983) *Indonesia Negara Berdasarkan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Willy D.S. Voll, (2013) *Negara Hukum Dalam Keadaan Pengecualian*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yopie Morya Immanuel Patiro (2011) *Diskresi Pejabat Publik Dan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Keni Media.

Yuswalina, (2018) *Hukum Administrasi Negara*. Malang: Setara Press.

B. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

-----, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

-----, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

-----, Undang-undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan, UU Nomor 15 Tahun 2006

-----, Undang-undang tentang Administrasi pemerintahan, UU Nomor 30 Tahun 2014

-----, Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara, UU Nomor 5 Tahun 2014

-----, Peraturan Presiden Republik Indonesia, tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor 192 Tahun 2014

-----, Surat Edaran Mahkamah Agung, tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Nomor 04/Bua.6/Hs/SP/XII/2016

-----, Undang-undang tentang Keuangan Negara, Nomor 17 Tahun 2003

-----, Undang-undang tentang Pembendaharaan Negara, Nomor 1 Tahun 2004

-----, Undang-undang tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Nomor 15 Tahun 2004

C. Karya Ilmiah, Jurnal Hukum,

Abdul Latif. *"Tafsir Hakim Terhadap Unsur Melawan Hukum Pasca Putusan MK Atas Pengujian UU PTPK."* Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010.

Solechan. *"Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik."* Jurnal Administrative Law & Governance Journal, Vol 2 issue 3, August 2019.

Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar, *"Komparasi Sifat Mengikat Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Dan Pengadilan Tata Usaha Negara"* Jurnal Mimbar Hukum, Volume 19, Nomor 3, Oktober 2007.

Firzhal Arzhi Jiwantara dan Karmal Maksudi dan Azrul Azwar, *"Keputusan Sebagai Norma Penutup Dalam Instrumen Hukum Pemerintahan"* Jurnal Education and Development, Volume 9, No.4,

Rika Marlina, *"Pembagian kekuasaan Dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia"* Jurnal Daulat Hukum, Volume 1, Nomor 1, Maret 2018.

Ahmad Yani, *"Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945"* Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 15, Nomor 2. Juli 2018.

Winasis Yulianto, *Rekonseptualisasi Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara*, Jurnal Ilmiah Fenomena, Volume XII, Nomor 1. Mei 2014.

D. Sumber Lain

Sumber dari Internet, <http://www.bpkp.go.id/konten/4/Sejarah-Singkat-BPKP.bpkp>

(diunduh pada hari Senin, 05 April 2021)

